



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
&
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAMBAHAN
TAHUN 2020 - 2024**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY

2020



Daftar Isi

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR : W14.3135. PR.03.02
TAHUN 2020 dan NOMOR : W14.3419. PR.03.02 TAHUN 2020

Daftar isi	1
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	3
BAB II Pengertian Indikator Kinerja	
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama.....	4
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	4
BAB III Gambaran Umum	
3.1. Visi	6
3.2. Misi.....	7
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	10
3.4. Arah Kebijakan	11
BAB IV Penutup.....	16
Lampiran Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama Tambahan	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 . Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikankinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3. Landasan Hukum

1. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015- 2019.

BAB II

PENGETIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/Kanwil/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :

1. *Spesifik;*
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. *Measurable;*
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. *Achievable;*
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. *Relevant;*
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. *Timelines;*
Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdayasaing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

3.2. Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

- **Misi ke-6 :**
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Dukungan Kementerian Hukum
- **Misi ke-7 :**
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- **Misi ke-8 :**
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu

menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan public yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (easy of doing business/EODB) Indonesia didunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan Negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia diperbatasan.
- c. Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan Negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.

d. Di bidang administrasi hukum umum

4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Alternatif:

Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan man, money, materials, machines, and methods (5M) secara terukur, dimana Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Money atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. Materials terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai

salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bias bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Machine atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan methods adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat

7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;

4. pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
5. penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi, adil dan berkelanjutan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “public wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan public yang berkualitas pada seluruh warga public dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan public berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;

2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab	
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN Ditjen AHU Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM	
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum		
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ		
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkoba berbasis masyarakat		
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi		
		Pelaksanaan SPPT-TI		
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)		

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program 	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasyarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM

	<p>Prioritas 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda <p>(Program Prioritas 5)</p>	<p>terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular</p> <ul style="list-style-type: none"> • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	
<p>Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan <p>(Program Prioritas 2)</p>	<p>Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Kekayaan Intelektual

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : W14.3135.PR.01.03 TAHUN 2020
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 – 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-04.PR.01.03 Tahun 2018, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 -2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015- 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 – 2024.

- KESATU : Menetapkan hasil penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini.
- KEDUA : IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menyempurnakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 5 Juni 2020
Kepala Kantor Wilayah,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and lines, positioned below the typed name and NIP.

Indro Purwoko
NIP 196202021985021001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : W14.3419.PR.01.03 TAHUN 2020
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 – 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-04.PR.01.03 Tahun 2018, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama Tambahan, di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015- 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 – 2024.

- KESATU : Menetapkan hasil penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut IKU Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini.
- KEDUA : IKU Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menyempurnakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 19 Juni 2020
Kepala Kantor Wilayah,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke at the end.

Indro Purwoko
NIP 196202021985021001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2020**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
KEPALA KANTOR WILAYAH				
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Bertambahnya Nilai IKM terhadap penilaian internal melalui survey	7,1	Kepala Divisi Administrasi
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Penilaian yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya oleh Tim Penilai Itjen	85	Kepala Divisi Administrasi
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Penilaian yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya oleh Tim Penilai Itjen	85	Kepala Divisi Administrasi
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan UPT PAS di wilayah	Persentase UPT Pemasarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas Pemasarakatan di wilayah sesuai standar	Jumlah UPT Pemasarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas Pemasarakatan di wilayah sesuai standar dibagi jumlah UPT di wilayah dikali seratus persen	90%	Kepala Divisi Pemasarakatan
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	Jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	Kepala Divisi Pemasarakatan
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	Jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	Kepala Divisi Pemasarakatan
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar	Jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	Kepala Divisi Pemasarakatan
	Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi	Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi	100%	Kepala Divisi Pemasarakatan
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar	Jumlah Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar dibagi Jumlah Tahanan dikali seratus persen	90%	Kepala Divisi Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar	Jumlah basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar dibagi Jumlah basan baran dikali seratus persen	90%	Kepala Divisi Pemasarakatan
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	Kepala Divisi Pemasarakatan
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	Kepala Divisi Pemasarakatan
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	Kepala Divisi Pemasarakatan
	Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	Kepala Divisi Pemasarakatan
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemsarakatan di wilayah sesuai standar	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar	Jumlah klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar dibagi jumlah klien dikali seratus persen	90%	Kepala Divisi Pemasarakatan
Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar	Jumlah anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar dibagi Jumlah anak dikali seratus persen	90%	Kepala Divisi Pemasarakatan
	Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar	Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar dibagi Jumlah anak dikali seratus persen	90%	Kepala Divisi Pemasarakatan
	Persentase anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar	Jumlah anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar dibagi Jumlah anak dikali seratus persen	90%	Kepala Divisi Pemasarakatan
Peningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasarakatan	Menurunnya Persentase Residivis	Jumlah residivis di wilayah dibagi Jumlah Narapidana di wilayah dikali seratus persen	9,8%	Kepala Divisi Pemasarakatan
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dibagi jumlah pengaduan yang ada dikali seratus persen	90%	Kepala Divisi Pemasarakatan
	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	Jumlah pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar dibagi jumlah gangguan kemananan diakli seratus persen	90%	Kepala Divisi Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	Jumlah gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar dibagi jumlah gangguan keamanan dikali seratus persen	90%	Kepala Divisi Pemasyarakatan
Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	Kepala Divisi Pemasyarakatan
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar	1 layanan	Kepala Divisi Pemasyarakatan
	Tersediannya data pegawai pemasyarakatan sesuai dengan kompetensi	Tersediannya data pegawai pemasyarakatan sesuai dengan kompetensi	1 layanan	Kepala Divisi Pemasyarakatan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	Kepala Divisi Pemasyarakatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian diWilayah	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	20 kegiatan	Kepala Divisi Keimigrasian
Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian	Jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran hukum keimigrasian di wilayah yang diselesaikan dibagi jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran hukum keimigrasian di wilayah yang diterima dikali seratus persen	2%	Kepala Divisi Keimigrasian
Meningkatnya pemeriksaan Keimigrasian diTempat Pemeriksaan Imigrasi	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	5 kegiatan	Kepala Divisi Keimigrasian
Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker	Survey Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker	3 Indeks	Kepala Divisi Keimigrasian
	Jumlah Layanan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Manajemen Satker	1 layanan	Kepala Divisi Keimigrasian
Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Layanan Internal Overhead	Jumlah Layanan Internal Overhead	1 layanan	Kepala Divisi Keimigrasian
Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	Kepala Divisi Keimigrasian
Meningkatnya jumlah PNPB Administrasi Hukum Umum diwilayah	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya efektivitas Pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran tugas Notaris di wilayah yang diselesaikan dibagi jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran tugas Notaris di wilayah yang diterima dikali seratus persen	80%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan KI melalui kantor wilayah	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan KI melalui kantor wilayah	1000 pemohon	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	30 stakeholder	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 lokus	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	20 Raperda	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Terselenggaranya pembinaan Perancang peraturan perundang- undangan	Jumlah perancang peraturan perundang- undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	jumlah tenaga perancang peraturan perundang- undangan yang mendapatkan pembinaan	25 Orang	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM bertambah dibandingkan tahun sebelumnya	5 Instansi Pemerintah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM bertambah dibandingkan tahun sebelumnya	5 kab/kota	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM bertambah dibandingkan tahun sebelumnya	1 Instansi Pemerintah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	3 Rekomendasi%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	236 orang	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM	Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	31 kegiatan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum Di wilayah	Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum Di wilayah	1 Kanwil	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kanwil	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kanwil	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 Kanwil	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM	Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM dibagi jumlah rekomendasi yang ad dikali seratus persen	60%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di Wilayah	Hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di Wilayah	1 Buku	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI				
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Bertambahnya Nilai IKM terhadap penilaian internal melalui survey	7,1	
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Penilaian yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya oleh Tim Penilai Itjen	85	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Penilaian yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya oleh Tim Penilai Itjen	85	
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT				
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Bertambahnya Nilai IKM terhadap penilaian internal melalui survey	7,1	Kepala Subbagian Program dan Pelaporan dan HRBTI
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Penilaian yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya oleh Tim Penilai Itjen	85	Kepala Subbagian HRBTI
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Penilaian yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya oleh Tim Penilai Itjen	85	Kepala subbagian Program dan Pelaporan
KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN				

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Bertambahnya Nilai IKM terhadap penilaian internal melalui survey	7,1	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Penilaian yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya oleh Tim Penilai Itjen	85	
KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, REFORMASI BIROKRASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI				
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Bertambahnya Nilai IKM terhadap penilaian internal melalui survey	7,1	
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Penilaian yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya oleh Tim Penilai Itjen	85	
KEPALA BAGIAN UMUM				
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Bertambahnya Nilai IKM terhadap penilaian internal melalui survey	7,1	Kepala Subbagian Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga dan Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Penilaian yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya oleh Tim Penilai Itjen	85	Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN
KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA				
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Bertambahnya Nilai IKM terhadap penilaian internal melalui survey	7,1	
KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA				
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Bertambahnya Nilai IKM terhadap penilaian internal melalui survey	7,1	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Penilaian yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya oleh Tim Penilai Itjen	85	
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan UPT PAS diwilayah	Persentase UPT Pemasarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas Pemasarakatan di wilayah sesuai standar	Jumlah UPT Pemasarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas Pemasarakatan di wilayah sesuai standar dibagi jumlah UPT di wilayah dikali seratus persen	90%	Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan TI

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	Jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	Kepala Bidang Pelayanan Tahanan Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	Jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar	Jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	
	Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi	Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi	100%	
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar	Jumlah Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar dibagi Jumlah Tahanan dikali seratus persen	90%	Kepala Bidang Pelayanan Tahanan Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar	Jumlah basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar dibagi Jumlah basan baran dikali seratus persen	90%	Kepala Bidang Pelayanan Tahanan Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan TI
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	
	Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat di wilayah sesuai standar	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar	Jumlah klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar dibagi jumlah klien dikali seratus persen	90%	Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan TI
Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar	Jumlah anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar dibagi Jumlah anak dikali seratus persen	90%	Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan TI
	Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar	Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar dibagi Jumlah anak dikali seratus persen	90%	Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan TI
	Persentase anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar	Jumlah anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar dibagi Jumlah anak dikali seratus persen	90%	Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan TI
Peningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Masyarakat	Menurunnya Persentase Residivis	Jumlah residivis di wilayah dibagi Jumlah Narapidana di wilayah dikali seratus persen	9,8%	Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan TI
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dibagi jumlah pengaduan yang ada dikali seratus persen	90%	Kepala Bidang Pelayanan Tahanan Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan
	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	Jumlah pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar dibagi jumlah gangguan kemananan diakli seratus persen	90%	Kepala Bidang Pelayanan Tahanan Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan
	Persentase gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	Jumlah gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar dibagi jumlah gangguan keamanan dikali seratus persen	90%	Kepala Bidang Pelayanan Tahanan Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan
Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan TI
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar	1 layanan	Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan TI
	Tersediannya data pegawai masyarakat sesuai dengan kompetensi	Tersediannya data pegawai masyarakat sesuai dengan kompetensi	1 layanan	Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan TI
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan TI
KEPALA BIDANG PEMBINAAN, BIMBINGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI				

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan UPT PAS diwilayah	Persentase UPT Pemasarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas Pemasarakatan di wilayah sesuai standar	Jumlah UPT Pemasarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas Pemasarakatan di wilayah sesuai standar dibagi jumlah UPT di wilayah dikali seratus persen	90%	Kepala Subbidang Pembinaan, TI dan Kerjasama
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana diwilayah sesuai standar	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	Kepala Subbidang Pembinaan, TI dan Kerjasama
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	Kepala Subbidang Pembinaan, TI dan Kerjasama
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	Kepala Subbidang Pembinaan, TI dan Kerjasama
	Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	Kepala Subbidang Pembinaan, TI dan Kerjasama
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemsarakatan di wilayah sesuai standar	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar	Jumlah klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar dibagi jumlah klien dikali seratus persen	90%	Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar	Jumlah anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar dibagi Jumlah anak dikali seratus persen	90%	Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
	Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar	Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar dibagi Jumlah anak dikali seratus persen	90%	Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
	Persentase anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar	Jumlah anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar dibagi Jumlah anak dikali seratus persen	90%	Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
Peningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasarakatan	Menurunnya Persentase Residivis	Jumlah residivis di wilayah dibagi Jumlah Narapidana di wilayah dikali seratus persen	9,8%	Kepala Subbidang Pembinaan, TI dan Kerjasama
Terselenggarannya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	Kepala Subbidang Pembinaan, TI dan Kerjasama

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar	1 layanan	Kepala Subbidang Pembinaan, TI dan Kerjasama
	Tersediannya data pegawai pemasyarakatan sesuai dengan kompetensi	Tersediannya data pegawai pemasyarakatan sesuai dengan kompetensi	1 layanan	Kepala Subbidang Pembinaan, TI dan Kerjasama
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	Kepala Subbidang Pembinaan, TI dan Kerjasama
KEPALA SUBBIDANG PEMBINAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KERJA SAMA				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan UPT PAS diwilayah	Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas Pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	Jumlah UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas Pemasyarakatan di wilayah sesuai standar dibagi jumlah UPT di wilayah dikali seratus persen	90%	
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana diwilayah sesuai standar	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	
	Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	
Peningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan	Menurunnya Persentase Residivis	Jumlah residivis di wilayah dibagi Jumlah Narapidana di wilayah dikali seratus persen	9,8%	
Terselenggarannya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar	1 layanan	
	Tersediannya data pegawai pemasyarakatan sesuai dengan kompetensi	Tersediannya data pegawai pemasyarakatan sesuai dengan kompetensi	1 layanan	
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
KEPALA SUBBIDANG BIMBINGAN DAN PENGENTASAN ANAK				
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat di wilayah sesuai standar	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar	Jumlah klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar dibagi jumlah klien dikali seratus persen	90%	
Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar	Jumlah anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar dibagi Jumlah anak dikali seratus persen	90%	
	Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar	Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar dibagi Jumlah anak dikali seratus persen	90%	
	Persentase anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar	Jumlah anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar dibagi Jumlah anak dikali seratus persen	90%	
KEPALA BIDANG PELAYANAN TAHANAN, KESEHATAN, REHABILITASI, PENGELOLAAN BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN NEGARA, DAN KEAMANAN				
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	Jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	Jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar	Jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
	Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi	Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi	100%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar	Jumlah Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar dibagi Jumlah Tahanan dikali seratus persen	90%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran diwilayah sesuai standar	Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar	Jumlah basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar dibagi Jumlah basan baran dikali seratus persen	90%	Kepala Subbidang Pengelolaan Basan Baran dan Kemanan
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dibagi jumlah pengaduan yang ada dikali seratus persen	90%	Kepala Subbidang Pengelolaan Basan Baran dan Kemanan
	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	Jumlah pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar dibagi jumlah gangguan kemananan diakli seratus persen	90%	Kepala Subbidang Pengelolaan Basan Baran dan Kemanan
	Persentase gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	Jumlah gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar dibagi jumlah gangguan keamanan dikali seratus persen	90%	Kepala Subbidang Pengelolaan Basan Baran dan Kemanan
KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN TAHANAN, PERAWATAN KESEHATAN, DAN REHABILITASI				
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan diwilayah sesuai standar	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	Jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	Jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar	Jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali seratus persen	90%	
	Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi	Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi	100%	
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar	Jumlah Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar dibagi Jumlah Tahanan dikali seratus persen	90%	
KEPALA SUBBIDANG PENGELOLAAN BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN NEGARA, DAN KEAMANAN				
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran diwilayah sesuai standar	Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar	Jumlah basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar dibagi Jumlah basan baran dikali seratus persen	90%	
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dibagi jumlah pengaduan yang ada dikali seratus persen	90%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	Jumlah pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar dibagi jumlah gangguan kemananan diakli seratus persen	90%	
	Persentase gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	Jumlah gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar dibagi jumlah gangguan keamanan dikali seratus persen	90%	
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian diWilayah	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	20 kegiatan	Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian
Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian	Jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran hukum keimigrasian di wilayah yang diselesaikan dibagi jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran hukum keimigrasian di wilayah yang diterima dikali seratus persen	2%	Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Meningkatnya pemeriksaan Keimigrasian diTempat Pemeriksaan Imigrasi	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	5 kegiatan	Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker	Survey Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker	3 Indeks	Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian
	Jumlah Layanan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Manajemen Satker	1 layanan	Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Layanan Internal Overhead	Jumlah Layanan Internal Overhead	1 layanan	Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian
KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN INFORMASI KEIMIGRASIAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian diWilayah	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	20 kegiatan	Kepala Subbidang Perizinan Keimigrasian
Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker	Survey Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker	3 Indeks	Kepala Subbidang Perizinan Keimigrasian
Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian
KEPALA SUBBIDANG PERIZINAN KEIMIGRASIAN				
Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian diWilayah	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	20 kegiatan	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker	Survey Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker	3 Indeks	
KEPALA SUBBIDANG INFORMASI KEIMIGRASIAN				
Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	
KEPALA BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN				
Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian	Jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran hukum keimigrasian di wilayah yang diselesaikan dibagi jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran hukum keimigrasian di wilayah yang diterima dikali seratus persen	2%	Kepala Subbidang Intelijen Keimigrasian
Meningkatnya pemeriksaan Keimigrasian diTempat Pemeriksaan Imigrasi	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	5 kegiatan	Kepala Subbidang Intelijen Keimigrasian
Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Manajemen Satker	1 layanan	Kepala Subbidang Penindakan Keimigrasian
Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Layanan Internal Overhead	Jumlah Layanan Internal Overhead	1 layanan	Kepala Subbidang Penindakan Keimigrasian
KEPALA SUBBIDANG INTELIJEN KEIMIGRASIAN				
Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian	Jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran hukum keimigrasian di wilayah yang diselesaikan dibagi jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran hukum keimigrasian di wilayah yang diterima dikali seratus persen	2%	
Meningkatnya pemeriksaan Keimigrasian diTempat Pemeriksaan Imigrasi	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	5 kegiatan	
KEPALA SUBBIDANG PENINDAKAN KEIMIGRASIAN				
Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Manajemen Satker	1 layanan	
Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Layanan Internal Overhead	Jumlah Layanan Internal Overhead	1 layanan	
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA				
Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum diwilayah	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Kepala Bidang Pelayanan Hukum
Meningkatnya efektivitas Pelaksanaan tugas MPNW, MPWdan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran tugas Notaris di wilayah yang diselesaikan dibagi jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran tugas Notaris di wilayah yang diterima dikali seratus persen	80%	Kepala Bidang Pelayanan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan KI melalui kantor wilayah	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan KI melalui kantor wilayah	1000 pemohon	Kepala Bidang Pelayanan Hukum
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	30 stakeholder	Kepala Bidang Pelayanan Hukum
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 lokus	Kepala Bidang Pelayanan Hukum
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	20 Raperda	Kepala Bidang Hukum
Terselenggaranya pembinaan Perancang peraturan perundang- undangan	Jumlah perancang peraturan perundang- undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	jumlah tenaga perancang peraturan perundang- undangan yang mendapatkan pembinaan	25 Orang	Kepala Bidang Hukum
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM bertambah dibandingkan tahun sebelumnya	5 Instansi Pemerintah	Kepala Bidang HAM
	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM bertambah dibandingkan tahun sebelumnya	5 kab/kota	Kepala Bidang HAM
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM bertambah dibandingkan tahun sebelumnya	1 Instansi Pemerintah	Kepala Bidang HAM
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	3 Rekomendasi%	Kepala Bidang HAM
Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	236 orang	Kepala Bidang Hukum
	Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	31 kegiatan	Kepala Bidang Hukum
	Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum Di wilayah	Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum Di wilayah	1 Kanwil	Kepala Bidang Hukum
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kanwil	Kepala Bidang Hukum
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kanwil	Kepala Bidang Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM	Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 Kanwil	Kepala Bidang Hukum
	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM	Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM dibagi jumlah rekomendasi yang ada dikali seratus persen	60%	Kepala Bidang HAM
	Hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di Wilayah	Hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di Wilayah	1 Buku	Kepala Bidang HAM
KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM				
Meningkatnya jumlah PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Kepala Subbidang Pelayanan AHU
Meningkatnya efektivitas Pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran tugas Notaris di wilayah yang diselesaikan dibagi jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran tugas Notaris di wilayah yang diterima dikali seratus persen	80%	Kepala Subbidang Pelayanan AHU
Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan KI melalui kantor wilayah	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan KI melalui kantor wilayah	1000 pemohon	Kepala Subbidang Pelayanan KI
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	30 stakeholder	Kepala Subbidang Pelayanan KI
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 lokus	Kepala Subbidang Pelayanan KI
KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM				
Meningkatnya jumlah PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	
Meningkatnya efektivitas Pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran tugas Notaris di wilayah yang diselesaikan dibagi jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran tugas Notaris di wilayah yang diterima dikali seratus persen	80%	
KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL				
Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan KI melalui kantor wilayah	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan KI melalui kantor wilayah	1000 pemohon	
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	30 stakeholder	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 lokus	
KEPALA BIDANG HUKUM				
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	20 Raperda	Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
Terselenggaranya pembinaan Perancang peraturan perundang- undangan	Jumlah perancang peraturan perundang- undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	jumlah tenaga perancang peraturan perundang- undangan yang mendapatkan pembinaan	25 Orang	Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	236 orang	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIHN
	Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	31 kegiatan	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIHN
	Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum Di wilayah	Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum Di wilayah	1 Kanwil	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIHN
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kanwil	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIHN
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kanwil	Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
	Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 Kanwil	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIHN
KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH				
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	20 Raperda	
Terselenggaranya pembinaan Perancang peraturan perundang- undangan	Jumlah perancang peraturan perundang- undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	jumlah tenaga perancang peraturan perundang- undangan yang mendapatkan pembinaan	25 Orang	
KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, DAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM				
Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	236 orang	
	Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	31 kegiatan	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
	Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum Di wilayah	Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum Di wilayah	1 Kanwil	
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kanwil	
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kanwil	
	Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 Kanwil	
KEPALA BIDANG HAK ASASI MANUSIA				
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM bertambah dibandingkan tahun sebelumnya	5 Instansi Pemerintah	Kepala Subbidang Pemajuan HAM
	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM bertambah dibandingkan tahun sebelumnya	5 kab/kota	Kepala Subbidang Pemajuan HAM
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM bertambah dibandingkan tahun sebelumnya	1 Instansi Pemerintah	Kepala Subbidang Pemajuan HAM
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	3 Rekomendasi%	Kepala Subbidang Pemajuan HAM
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM	Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM dibagi jumlah rekomendasi yang ad dikali seratus persen	60%	Kepala Subbidang Pengkajian, Litbang Kumham
	Hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di Wilayah	Hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di Wilayah	1 Buku	Kepala Subbidang Pengkajian, Litbang Kumham
KEPALA SUBBIDANG PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA				
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM bertambah dibandingkan tahun sebelumnya	5 Instansi Pemerintah	
	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM bertambah dibandingkan tahun sebelumnya	5 kab/kota	
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM bertambah dibandingkan tahun sebelumnya	1 Instansi Pemerintah	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	3 Rekomendasi%	
KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA				
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM	Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM dibagi jumlah rekomendasi yang ad dikali seratus persen	60%	
	Hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di Wilayah	Hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di Wilayah	1 Buku	



Kepala Kantor Wilayah

Indro Purwoko
NIP 196202021985021001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2020**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN	Persentase	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
			2020	
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Bertambahnya Nilai IKM terhadap penilaian layanan publik melalui survey kepuasan masyarakat	SANGAT BAIK	
Nilai Reformasi Birokrasi	Persentase satuan kerja yang membangun Zona Integritas dengan mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi sehingga diusulkan mendapatkan predikat WBK oleh TPI	Jumlah unit kerja yang memperoleh IPK minimal 13,5, minimal IKM 16 dan TLHP minimal 4,5	17	



Kepala Kantor Wilayah

Indro Purwoko
NIP 196202021985021001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TAHUN 2021 - 2024**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
KEPALA KANTOR WILAYAH							
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	Penilaian oleh Menpan RB	82	85	87	90	Kepala Divisi Administrasi
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian oleh Menpan RB	88	90	92	94	Kepala Divisi Administrasi
	Nilai Maturitas SPIP	Penilaian oleh Tim Penilai ITJEN	3	3	3	4	Kepala Divisi Administrasi
	Opini Atas Laporan Keuangan	Penilaian oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	Kepala Divisi Administrasi
	Indeks Persepsi Integritas	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Persepsi Integritas Kemenkumham oleh ITJEN	66	67	68	69	Kepala Divisi Administrasi
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	Jumlah satuan kerja yang mendapat nilai AKIP minimal "BB" dibagi seluruh satuan kerja dikali 100%	92%	93%	94%	95%	Kepala Divisi Administrasi
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	Jumlah satuan kerja yang mendapat capaian nilai RB minimal 90 dibagi seluruh satuan kerja dikali 100%	92%	93%	94%	95%	Kepala Divisi Administrasi
	Persentase Satuan Kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM	Seluruh satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibagi seluruh satuan kerja dikali 100%	6%	6%	6,5%	6,5%	Kepala Divisi Administrasi
	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Persepsi Integritas Kemenkumham oleh ITJEN	66	67	68	68	Kepala Divisi Administrasi
Terwujudnya Layanan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Survey Internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atas layanan internal yang dilaksanakan oleh Divisi Administrasi	3.1	3.1	3.1	3.1	Kepala Divisi Administrasi
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3.15	3.2	3.25	3.3	Kepala Divisi Pemasarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Terwujudnya penyelenggaraan pemsarakatan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemsarakatan	Survey Indeks Kepuasan Layanan Pemsarakatan	75	80	85	90	Kepala Divisi Pemsarakatan
	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemsarakatan	Survey Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemsarakatan	75	80	85	90	Kepala Divisi Pemsarakatan
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan TI Pemsarakatan	Survey Indeks Kepuasan Pengguna Layanan TI Pemsarakatan	75	80	85	90	Kepala Divisi Pemsarakatan
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	Survey Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	73	78	83	88	Kepala Divisi Pemsarakatan
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Pemsarakatan yang produktif, mandiri, berdaya guna	Jumlah klien Pemsarakatan yang produktif, mandiri, berdaya guna dibagi jumlah klien pemsarakatan x 100%	0.4	0.45	0.5	0.55	Kepala Divisi Pemsarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitas nilainya	Jumlah Rekomendasi lelang Basan Baran dibagi jumlah penilaian depreciasi basan baran x 100%	0.6	0.7	0.8	0.9	Kepala Divisi Pemasyarakatan
	Persentase menurunnya residivis	Periode Persentasi Residivis Periode sebelumnya dikurangi Periode Persentasi Residivis Periode berjalan	0.01	0.01	0.01	0.01	Kepala Divisi Pemasyarakatan
	Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan	Jumlah tahanan dikurangi jumlah tahanan overstaying dibagi jumlah tahanan x 100%	0.7	0.8	0.9	1	Kepala Divisi Pemasyarakatan
Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	Survey Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	49	53	56	60	Kepala Divisi Pemasyarakatan
	Indeks pemenuhan hak narapidana	Survey Indeks pemenuhan hak narapidana	87.5	90	92.5	95	Kepala Divisi Pemasyarakatan
	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan	Survey Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan	40	50	60	70	Kepala Divisi Pemasyarakatan
	Indeks pembinaan khusus anak	Survey Indeks pembinaan khusus anak	60	68	74	84	Kepala Divisi Pemasyarakatan
	Indeks pengelolaan basan baran	Survey Indeks pengelolaan basan baran	60	70	80	90	Kepala Divisi Pemasyarakatan
	Indeks pelayanan tahanan	Survey Indeks pelayanan tahanan	60	70	80	90	Kepala Divisi Pemasyarakatan
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Survey Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	80	81	82	83	Kepala Divisi Pemasyarakatan
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	Survey Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	70	75	80	85	Kepala Divisi Pemasyarakatan
Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang aman dan tertib	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	Survey Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	70	75	80	85	Kepala Divisi Pemasyarakatan
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3.15	3,20	3.25	3.3	Kepala Divisi Keimigrasian
Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	Survey Indeks Pengamanan Keimigrasian	3.11	3.12	3.13	3.14	Kepala Divisi Keimigrasian
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.15	3.2	3.25	3.3	Kepala Divisi Keimigrasian
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Survey Indeks Kepuasan Internal di Wilayah yang dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian	3.11	3.12	3.13	3.14	Kepala Divisi Keimigrasian
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	Survey Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.11	3.12	3.13	3.14	Kepala Divisi Keimigrasian
Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	Jumlah permohonan layanan AHU yang tepat waktu dan berkepastian hukum yang diselesaikan dibagi jumlah layanan AHU yang tepat waktu dan berkepastian hukum yang diterima di wilayah dikali seratus persen	84%	86%	88%	90%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	Jumlah peningkatan PNPB AHU di wilayah yang diselesaikan tahun ini dibagi jumlah PNPB AHU di wilayah yang diselesaikan tahun lalu dikali seratus persen	5%	5%	5%	5%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah yang diselesaikan dibagi jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah yang	82%	84%	86%	88%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3.3	3.32	3.34	3.36	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Jumlah permohonan KI sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselesaikan dibagi jumlah target permohonan KI yang direncanakan di wilayah dikali seratus persen	99%	99%	99%	99%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual	Jumlah permohonan KI yang diselesaikan tahun ini dibagi jumlah permohonan KI yang diselesaikan tahun lalu dikali seratus persen	12%	15%	17%	20%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)	Jumlah produk KI dan komunal yang dilindungi (PN) yang diselesaikan tahun ini dibagi jumlah produk KI dan komunal yang dilindungi (PN) yang diselesaikan tahun lalu dikali seratus persen	6%	7%	8%	9%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Persentase penanganan aduan pelanggaran KI	Jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang diselesaikan dibagi jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang diterima dikali seratus persen	100%	100%	100%	100%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	630 Layanan	631 Layanan	663 Layanan	665 Layanan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	Jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang diselesaikan dibagi jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang diterima dikali seratus persen	100%	100%	100%	100%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	1 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	Jumlah pelaksanaan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas peraturan perundang-undangan	Survey Indeks kualitas peraturan perundang-undangan	3.1	3.15	3.2	3.25	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	jumlah permohonan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan dibagi jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang direncanakan x 100%	80%	80%	80%	80%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mengikuti bimtek/diklat terkait pembinaan tenaga perancang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	Presentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	jumlah permohonan harmonisasi/jumlah harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan permohonan yang diselesaikan dibagi jumlah permohonan yang masuk x 100%	80%	80%	80%	80%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	jumlah permohonan rancanganperda yang difasilitasi oleh Kanwil yang diselesaikan dibagi jumlah permohonan yang masuk x 100%	80%	80%	80%	80%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mengikuti bimtek/diklat terkait pembinaan tenaga perancang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	jumlah hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan yang diselesaikan dibagi jumlah permohonan yang masuk x 100%	20%	20%	20%	20%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan dibagi jumlah RUU Parakarsa Pemerintah yang ada x 100%	25%	20%	15%	15%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah yang dilakukan oleh Kanwil	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Survey Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Jumlah desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada x 100%	70%	70%	70%	70%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	77%	81%	81%	81%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	79%	80%	80%	80%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survey Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Terwujudnya kesadaran dan Pemahaman hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Survey Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.6%	76.6%	76.6%	76.6%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	77%	81%	81%	81%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	79%	80%	80%	80%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survey Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.6%	76.6%	76.6%	76.6%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	77%	81%	81%	81%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	79%	80%	80%	80%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survey Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.60%	76.6%	76.6%	76.6%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Jumlah desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada x 100%	70%	70%	70%	70%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Persentase website anggota JDH aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDH	Jumlah website anggota JDH aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDH dibagi Jumlah website anggota JDH x 100%	20%	20%	20%	20%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	Jumlah KTI yang disitasi dibagi Jumlah KTI x 100%	20%	20%	20%	20%
Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset.	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	70%	80%	80%	80%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal.	Jumlah sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal dibagi sitasi KTI dikali seratus persen	20%	20%	20%	20%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	70%	80%	80%	80%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	Jumlah penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	Jumlah capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat yang memenuhi target dibagi jumlah capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat x 100%	65%	70%	75%	80%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	Jumlah capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/kota yang memenuhi HAM dibagi jumlah capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/kota x 100%	35%	40%	45%	50%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM yang menerima penghargaan dibagi Jumlah Kab/Kota Peduli HAM x 100%	15%	20%	25%	30%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dibagi Jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM yang diterima x 100%	50%	50%	50%	50%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM dibagi Jumlah instansi pemerintah x 100%	75%	75%	75%	75%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM di wilayah	4 Ins Pem	4 Ins Pem	4 Ins Pem	4 Ins Pem	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	jumlah kab/kota peduli HAM	jumlah kab/kota peduli HAM di wilayah	3	3	3	3	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM di wilayah	1	1	1	1	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Jumlah rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3	3	3	3	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah					
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI							
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	Penilaian oleh Menpan RB	82	85	87	90	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian oleh Menpan RB	88	90	92	94	
	Nilai Maturitas SPIP	Penilaian oleh Tim Penilai ITJEN	3	3	3	4	
	Opini Atas Laporan Keuangan	Penilaian oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Indeks Persepsi Integritas	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Persepsi Integritas Kemenkumham oleh ITJEN	66	67	68	69	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	Jumlah satuan kerja yang mendapat nilai AKIP minimal "BB" dibagi seluruh satuan kerja dikali 100%	92%	93%	94%	95%	
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	Junmlah satuan kerja yang mendapat capaian nilai RB minila 90 dibagi seluruh satuan kerja dikali 100%	92%	93%	94%	95%	
	Persentase Satuan Kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM	Seluruh satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibagi seluruh satuan kerja dikali 100%	6%	6%	6,5%	6,5%	
	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Persepsi Integritas Kemenkumham oleh ITJEN	66	67	68	68	
Terwujudnya Layanan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Survey Internal dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atas layanan internal yang dilaksanakan oleh Divisi Administrasi	3.1	3.1	3.1	3.1	
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT							

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	Penilaian oleh Menpan RB	82	85	87	90	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian oleh Menpan RB	88	90	92	94	
	Nilai Maturitas SPIP	Penilaian oleh Tim Penilai ITJEN	3	3	3	4	
	Indeks Persepsi Integritas	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Persepsi Integritas Kemenkumham oleh ITJEN	66	67	68	69	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	Jumlah satuan kerja yang mendapat nilai AKIP minimal "BB" dibagi seluruh satuan kerja dikali 100%	92%	93%	94%	95%	
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	Jumlah satuan kerja yang mendapat capaian nilai RB minimal 90 dibagi seluruh satuan kerja dikali 100%	92%	93%	94%	95%	
	Persentase Satuan Kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM	Seluruh satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibagi seluruh satuan kerja dikali 100%	6%	6%	6,5%	6,5%	
	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Persepsi Integritas Kemenkumham oleh ITJEN	66	67	68	68	
Terwujudnya Layanan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Survey Internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atas layanan internal yang dilaksanakan oleh Divisi Administrasi	3.1	3.1	3.1	3.1	
KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN							
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian oleh Menpan RB	88	90	92	94	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	Jumlah satuan kerja yang mendapat nilai AKIP minimal "BB" dibagi seluruh satuan kerja dikali 100%	92%	93%	94%	95%	
KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, REFORMASI BIROKRASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI							
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	Penilaian oleh Menpan RB	82	85	87	90	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian oleh Menpan RB	88	90	92	94	
	Nilai Maturitas SPIP	Penilaian oleh Tim Penilai ITJEN	3	3	3	4	
	Indeks Persepsi Integritas	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Persepsi Integritas Kemenkumham oleh ITJEN	66	67	68	69	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	Jumlah satuan kerja yang mendapat nilai AKIP minimal "BB" dibagi seluruh satuan kerja dikali 100%	92%	93%	94%	95%	
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	Jumlah satuan kerja yang mendapat capaian nilai RB minimal 90 dibagi seluruh satuan kerja dikali 100%	92%	93%	94%	95%	
	Persentase Satuan Kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM	Seluruh satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibagi seluruh satuan kerja dikali 100%	6%	6%	6,5%	6,5%	
	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Persepsi Integritas Kemenkumham oleh ITJEN	66	67	68	68	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Layanan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Survey Internal dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atas layanan internal yang dilaksanakan oleh Divisi Administrasi	3.1	3.1	3.1	3.1	
KEPALA BAGIAN UMUM							
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Opini Atas Laporan Keuangan	Penilaian oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Indeks Persepsi Integritas	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Persepsi Integritas Kemenkumham oleh ITJEN	66	67	68	69	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	Jumlah satuan kerja yang mendapat nilai AKIP minimal "BB" dibagi seluruh satuan kerja dikali 100%	92%	93%	94%	95%	
	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Persepsi Integritas Kemenkumham oleh ITJEN	66	67	68	68	
Terwujudnya Layanan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Survey Internal dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atas layanan internal yang dilaksanakan oleh Divisi Administrasi	3.1	3.1	3.1	3.1	
KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA							
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Opini Atas Laporan Keuangan	Penilaian oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	Jumlah satuan kerja yang mendapat nilai AKIP minimal "BB" dibagi seluruh satuan kerja dikali 100%	92%	93%	94%	95%	
KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ATATA USAHA DAN RUMAH TANGGA							
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Indeks Persepsi Integritas	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Persepsi Integritas Kemenkumham oleh ITJEN	66	67	68	69	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Persepsi Integritas Kemenkumham oleh ITJEN	66	67	68	68	
Terwujudnya Layanan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Survey Internal dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atas layanan internal yang dilaksanakan oleh Divisi Administrasi	3.1	3.1	3.1	3.1	
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3.15	3.2	3.25	3.3	
Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	Survey Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	75	80	85	90	
	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	Survey Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	75	80	85	90	
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan TI Pemasyarakatan	Survey Indeks Kepuasan Pengguna Layanan TI Pemasyarakatan	75	80	85	90	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	Survey Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	73	78	83	88	
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Pemasarakatan yang produktif, mandiri, berdaya guna	Jumlah klien Pemasarakatan yang produktif, mandiri, berdaya guna dibagi jumlah klien pemasarakatan x 100%	0.4	0.45	0.5	0.55	
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitas nilainya	Jumlah Rekomendasi lelang Basan Baran dibagi jumlah penilaian deprisiasi basan baran x 100%	0.6	0.7	0.8	0.9	
	Persentase menurunnya residivis	Periode Persentasi Residivis Periode sebelumnya dikurangi Periode Persentasi Residivis Periode berjalan	0.01	0.01	0.01	0.01	
	Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan	Jumlah tahanan dikurangi jumlah tahanan overstaying dibagi jumlah tahanan x 100%	0.7	0.8	0.9	1	
Terwujudnya penyelenggaraan pemasarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan, narapidana, anak, dan klien Pemasarakatan	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	Survey Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	49	53	56	60	
	Indeks pemenuhan hak narapidana	Survey Indeks pemenuhan hak narapidana	87.5	90	92.5	95	
	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasarakatan	Survey Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasarakatan	40	50	60	70	
	Indeks pembinaan khusus anak	Survey Indeks pembinaan khusus anak	60	68	74	84	
	Indeks pengelolaan basan baran	Survey Indeks pengelolaan basan baran	60	70	80	90	
	Indeks pelayanan tahanan	Survey Indeks pelayanan tahanan	60	70	80	90	
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Survey Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	80	81	82	83	
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	Survey Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	70	75	80	85	
Terwujudnya penyelenggaraan pemasarakatan yang aman dan tertib	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	Survey Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	70	75	80	85	
KEPALA BIDANG PEMBINAAN, BIMBINGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3.15	3.2	3.25	3.3	
Terwujudnya penyelenggaraan pemasarakatan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	Survey Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	75	80	85	90	
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan TI Pemasarakatan	Survey Indeks Kepuasan Pengguna Layanan TI Pemasarakatan	75	80	85	90	
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Pemasarakatan yang produktif, mandiri, berdaya guna	Jumlah klien Pemasarakatan yang produktif, mandiri, berdaya guna dibagi jumlah klien pemasarakatan x 100%	0.4	0.45	0.5	0.55	
	Persentase menurunnya residivis	Periode Persentasi Residivis Periode sebelumnya dikurangi Periode Persentasi Residivis Periode berjalan	0.01	0.01	0.01	0.01	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	Survey Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	49	53	56	60	
	Indeks pemenuhan hak narapidana	Survey Indeks pemenuhan hak narapidana	87.5	90	92.5	95	
	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan	Survey Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan	40	50	60	70	
	Indeks pembinaan khusus anak	Survey Indeks pembinaan khusus anak	60	68	74	84	
KEPALA SUBBIDANG PEMBINAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KERJA SAMA							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3.15	3.2	3.25	3.3	
Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	Survey Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	75	80	85	90	
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan TI Pemasyarakatan	Survey Indeks Kepuasan Pengguna Layanan TI Pemasyarakatan	75	80	85	90	
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri, berdaya guna	Jumlah klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri, berdaya guna dibagi jumlah klien pemasyarakatan x 100%	0.4	0.45	0.5	0.55	
	Persentase menurunnya residivis	Periode Persentasi Residivis Periode sebelumnya dikurangi Periode Persentasi Residivis Periode berjalan	0.01	0.01	0.01	0.01	
Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	Survey Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	49	53	56	60	
	Indeks pemenuhan hak narapidana	Survey Indeks pemenuhan hak narapidana	87.5	90	92.5	95	
KEPALA SUBBIDANG BIMBINGAN DAN PENGENTASAN ANAK							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3.15	3.2	3.25	3.3	
Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	Survey Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	75	80	85	90	
Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan	Survey Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan	40	50	60	70	
	Indeks pembinaan khusus anak	Survey Indeks pembinaan khusus anak	60	68	74	84	
KEPALA BIDANG PELAYANAN TAHANAN, KESEHATAN, REHABILITASI, PENGELOLAAN BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN NEGARA, DAN KEAMANAN							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3.15	3.2	3.25	3.3	
Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	Survey Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	75	80	85	90	
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitas nilainya	Jumlah Rekomendasi lelang Basan Baran dibagi jumlah penilaian depreisasi basan baran x 100%	0.6	0.7	0.8	0.9	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang berkualitas	Indeks pengelolaan basan baran	Survey Indeks pengelolaan basan baran	60	70	80	90	
	Indeks pelayanan tahanan	Survey Indeks pelayanan tahanan	60	70	80	90	
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Survey Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	80	81	82	83	
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	Survey Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	70	75	80	85	
Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang aman dan tertib	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	Survey Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	70	75	80	85	
KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN TAHANAN, PERAWATAN KESEHATAN, DAN REHABILITASI							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3.15	3.2	3.25	3.3	
Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	Survey Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	75	80	85	90	
Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang berkualitas	Indeks pelayanan tahanan	Survey Indeks pelayanan tahanan	60	70	80	90	
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Survey Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	80	81	82	83	
KEPALA SUBBIDANG PENGELOLAAN BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN NEGARA, DAN KEAMANAN							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3.15	3.2	3.25	3.3	
Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	Survey Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	75	80	85	90	
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang berkualitas	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitas nilainya	Jumlah Rekomendasi lelang Basan Baran dibagi jumlah penilaian depreciasi basan baran x 100%	0.6	0.7	0.8	0.9	
	Indeks pengelolaan basan baran	Survey Indeks pengelolaan basan baran	60	70	80	90	
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Survey Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	80	81	82	83	
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	Survey Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	70	75	80	85	
Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang aman dan tertib	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	Survey Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	70	75	80	85	
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3.15	3.2	3.25	3.3	
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3.15	3,20	3.25	3.3	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	Survey Indeks Pengamanan Keimigrasian	3.11	3.12	3.13	3.14	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.15	3.2	3.25	3.3	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Survey Indeks Kepuasan Internal di Wilayah yang dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian	3.11	3.12	3.13	3.14	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	Survey Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.11	3.12	3.13	3.14	
KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN INFORMASI KEIMIGRASIAN							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3.15	3.2	3.25	3.3	
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3.15	3,20	3.25	3.3	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.15	3.2	3.25	3.3	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Survey Indeks Kepuasan Internal di Wilayah yang dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian	3.11	3.12	3.13	3.14	
KEPALA SUBBIDANG PERIZINAN KEIMIGRASIAN							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3.15	3.2	3.25	3.3	
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3.15	3.2	3.25	3.3	
KEPALA SUBBIDANG INFORMASI KEIMIGRASIAN							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3.15	3.2	3.25	3.3	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.15	3.2	3.25	3.3	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Survey Indeks Kepuasan Internal di Wilayah yang dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian	3.11	3.12	3.13	3.14	
KEPALA BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3.15	3.2	3.25	3.3	
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3.15	3.2	3.25	3.3	
Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	Survey Indeks Pengamanan Keimigrasian	3.11	3.12	3.13	3.14	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.15	3.2	3.25	3.3	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Survey Indeks Kepuasan Internal di Wilayah yang dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian	3.11	3.12	3.13	3.14	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	Survey Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.11	3.12	3.13	3.14	
KEPALA SUBBIDANG INTELIJEN KEIMIGRASIAN							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3.15	3.2	3.25	3.3	
Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	Survey Indeks Pengamanan Keimigrasian	3.11	3.12	3.13	3.14	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Survey Indeks Kepuasan Internal di Wilayah yang dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian	3.11	3.12	3.13	3.14	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	Survey Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.11	3.12	3.13	3.14	
KEPALA SUBBIDANG PENINDAKAN KEIMIGRASIAN							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3.15	3.2	3.25	3.3	
Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	Survey Indeks Pengamanan Keimigrasian	3.11	3.12	3.13	3.14	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Survey Indeks Kepuasan Internal di Wilayah yang dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian	3.11	3.12	3.13	3.14	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	Survey Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.11	3.12	3.13	3.14	
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA							
Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	Jumlah permohonan layanan AHU yang tepat waktu dan berkepastian hukum yang diselesaikan dibagi jumlah layanan AHU yang tepat waktu dan berkepastian hukum yang diterima di wilayah dikali seratus persen	84%	86%	88%	90%	
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	Jumlah peningkatan PNPB AHU di wilayah yang diselesaikan tahun ini dibagi jumlah PNPB AHU di wilayah yang diselesaikan tahun lalu dikali seratus persen	5%	5%	5%	5%	
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah yang diselesaikan dibagi jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah yang	82%	84%	86%	88%	
Terlindungnya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3.3	3.32	3.34	3.36	
	Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Jumlah permohonan KI sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselesaikan dibagi jumlah target permohonan KI yang direncanakan di wilayah dikali seratus persen	99%	99%	99%	99%	
	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual	Jumlah permohonan KI yang diselesaikan tahun ini dibagi jumlah permohonan KI yang diselesaikan tahun lalu dikali seratus persen	12%	15%	17%	20%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)	Jumlah produk KI dan komunal yang dilindungi (PN) yang diselesaikan tahun ini dibagi jumlah produk KI dan komunal yang dilindungi (PN) yang diselesaikan tahun lalu dikali seratus persen	6%	7%	8%	9%	
	Persentase penanganan aduan pelanggaran KI	Jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang diselesaikan dibagi jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang diterima dikali seratus persen	100%	100%	100%	100%	
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	630 Layanan	631 Layanan	663 Layanan	665 Layanan	
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	Jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang diselesaikan dibagi jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang diterima dikali seratus persen	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	1 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	Jumlah pelaksanaan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas <u>pembentukan peraturan perundang-</u>	Indeks kualitas peraturan perundang-undangan	Survey Indeks kualitas peraturan perundang-undangan	3.1	3.15	3.2	3.25	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	jumlah permohonan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan dibagi jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang direncanakan x 100%	80%	80%	80%	80%	
	Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mengikuti bimtek/diklat terkait pembinaan tenaga perancang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	
	Presentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	jumlah permohonan harmonisasi/jumlah harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan permohonan yang diselesaikan dibagi jumlah permohonan yang masuk x 100%	80%	80%	80%	80%	
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemekumham	jumlah permohonan rancanganperda yang difasilitasi oleh Kanwil yang diselesaikan dibagi jumlah permohonan yang masuk x 100%	80%	80%	80%	80%	
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mengikuti bimtek/diklat terkait pembinaan tenaga perancang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	
Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	jumlah hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan yang diselesaikan dibagi jumlah permohonan yang masuk x 100%	20%	20%	20%	20%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan dibagi jumlah RUU Parakarsa Pemerintah yang ada x 100%	25%	20%	15%	15%	
Terseleenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah yang dilakukan oleh Kanwil	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Survey Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Jumlah desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada x 100%	70%	70%	70%	70%	
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	77%	81%	81%	81%	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	79%	80%	80%	80%	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survey Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	
Terwujudnya kesadaran dan Pemahaman hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Survey Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.61%	76.61%	76.61%	76.61%	
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	77%	81%	81%	81%	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	79%	80%	80%	80%	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survey Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61%	76.61%	76.61%	76.61%	
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	77%	81%	81%	81%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	79%	80%	80%	80%	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survey Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	77%	77%	77%	77%	
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Jumlah desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada x 100%	70%	70%	70%	70%	
	Persentase website anggota JDHNN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDHNN	Jumlah website anggota JDHNN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDHNN dibagi Jumlah website anggota JDHNN x 100%	20%	20%	20%	20%	
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	Jumlah KTI yang disitasi dibagi Jumlah KTI x 100%	20%	20%	20%	20%	
Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset.	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	70%	80%	80%	80%	
	Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal.	Jumlah sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal dibagi sitasi KTI dikali seratus persen	20%	20%	20%	20%	
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	70%	80%	80%	80%	
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	Jumlah penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	Jumlah capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat yang memenuhi target dibagi jumlah capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat x 100%	65%	70%	75%	80%	
	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	Jumlah capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/kota yang memenuhi HAM dibagi jumlah capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/kota x 100%	35%	40%	45%	50%	
Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM yang menerima penghargaan dibagi Jumlah Kab/Kota Peduli HAM x 100%	15%	20%	25%	30%	
	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dibagi Jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM yang diterima x 100%	50%	50%	50%	50%	
	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM dibagi Jumlah instansi pemerintah x 100%	75%	75%	75%	75%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM diwilayah	4 Ins Pem	4 Ins Pem	4 Ins Pem	4 Ins Pem	
	jumlah kab/kota peduli HAM	jumlah kab/kota peduli HAM di wilayah	3	3	1	1	
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM diwilayah	1	1	1	1	
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Jumlah rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3	3	3	3	
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	
KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA							
Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	Jumlah permohonan layanan AHU yang tepat waktu dan berkepastian hukum yang diselesaikan dibagi jumlah layanan AHU yang tepat waktu dan berkepastian hukum yang diterima di wilayah dikali seratus persen	84%	86%	88%	90%	
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	Jumlah peningkatan PNPB AHU di wilayah yang diselesaikan tahun ini dibagi jumlah PNPB AHU di wilayah yang diselesaikan tahun lalu dikali seratus persen	5%	5%	5%	5%	
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah yang diselesaikan dibagi jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah yang	82%	84%	86%	88%	
Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3.3	3.32	3.34	3.36	
	Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Jumlah permohonan KI sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselesaikan dibagi jumlah target permohonan KI yang direncanakan di wilayah dikali seratus persen	99%	99%	99%	99%	
	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual	Jumlah permohonan KI yang diselesaikan tahun ini dibagi jumlah permohonan KI yang diselesaikan tahun lalu dikali seratus persen	12%	15%	17%	20%	
	Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)	Jumlah produk KI dan komunal yang dilindungi (PN) yang diselesaikan tahun ini dibagi jumlah produk KI dan komunal yang dilindungi (PN) yang diselesaikan tahun lalu dikali seratus persen	6%	7%	8%	9%	
	Persentase penanganan aduan pelanggaran KI	Jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang diselesaikan dibagi jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang diterima dikali seratus persen	100%	100%	100%	100%	
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	630 Layanan	631 Layanan	663 Layanan	665 Layanan	
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	Jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang diselesaikan dibagi jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang diterima dikali seratus persen	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	1 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	Jumlah pelaksanaan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
KEPALA SUBBIDANG AHU							
Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	Jumlah permohonan layanan AHU yang tepat waktu dan berkepastian hukum yang diselesaikan dibagi jumlah layanan AHU yang tepat waktu dan berkepastian hukum yang diterima di wilayah dikali seratus persen	84%	86%	88%	90%	
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	Jumlah peningkatan PNPB AHU di wilayah yang diselesaikan tahun ini dibagi jumlah PNPB AHU di wilayah yang diselesaikan tahun lalu dikali seratus persen	5%	5%	5%	5%	
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah yang diselesaikan dibagi jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah yang diterima di wilayah dikali seratus persen	82%	84%	86%	88%	
KEPALA SUBBIDANG KI							
Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3.3	3.32	3.34	3.36	
	Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Jumlah permohonan KI sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselesaikan dibagi jumlah permohonan KI yang diterima di wilayah dikali seratus persen	99%	99%	99%	99%	
	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual	Jumlah permohonan KI yang diselesaikan tahun ini dibagi jumlah permohonan KI yang diselesaikan tahun lalu dikali seratus persen	12%	15%	17%	20%	
	Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)	Jumlah produk KI dan komunal yang dilindungi (PN) yang diselesaikan tahun ini dibagi jumlah produk KI dan komunal yang dilindungi (PN) yang diselesaikan tahun lalu dikali seratus persen	6%	7%	8%	9%	
	Persentase penanganan aduan pelanggaran KI	Jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang diselesaikan dibagi jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang diterima dikali seratus persen	100%	100%	100%	100%	
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	630 Layanan	631 Layanan	663 Layanan	665 Layanan	
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	Jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang diselesaikan dibagi jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang diterima dikali seratus persen	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	1 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	Jumlah pelaksanaan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
KEPALA BIDANG HUKUM							
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas peraturan perundang-undangan	Survey Indeks kualitas peraturan perundang-undangan	3.1	3.15	3.2	3.25	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	jumlah permohonan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan dibagi jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang direncanakan x 100%	80%	80%	80%	80%	
	Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mengikuti bimtek/diklat terkait pembinaan tenaga perancang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	
	Presentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	jumlah permohonan harmonisasi/jumlah harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan permohonan yang diselesaikan dibagi jumlah permohonan yang masuk x 100%	80%	80%	80%	80%	
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	jumlah permohonan rancanganperda yang difasilitasi oleh Kanwil yang diselesaikan dibagi jumlah permohonan yang masuk x 100%	80%	80%	80%	80%	
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mengikuti bimtek/diklat terkait pembinaan tenaga perancang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas peraturan perundang-undangan	Survey Indeks kualitas peraturan perundang-undangan	3.1	3.15	3.2	3.25	
Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	jumlah hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan yang diselesaikan dibagi jumlah permohonan yang masuk x 100%	20%	20%	20%	20%	
	Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan dibagi jumlah RUU Parakarsa Pemerintah yang ada x 100%	25%	20%	15%	15%	
Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah yang dilakukan oleh Kanwil	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Jumlah desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada x 100%	70%	70%	70%	70%	
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Survey Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	77%	81%	81%	81%	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	79%	80%	80%	80%	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Jumlah website anggota JDHNN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDHNN dibagi Jumlah website anggota JDHNN x 100%	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	
Terwujudnya kesadaran dan Pemahaman hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Survey Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.61%	76.61%	76.61%	76.61%	
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	77%	81%	81%	81%	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	79%	80%	80%	80%	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survey Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61%	76.61%	76.61%	76.61%	
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	77%	81%	81%	81%	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	79%	80%	80%	80%	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survey Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	77%	77%	77%	77%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Jumlah desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada x 100%	70%	70%	70%	70%	
	Persentase website anggota JDHIN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDHIN	Jumlah website anggota JDHIN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDHIN dibagi Jumlah website anggota JDHIN x 100%	20%	20%	20%	20%	
KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH							
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas peraturan perundang-undangan	Survey Indeks kualitas peraturan perundang-undangan	3.1	3.15	3.2	3.25	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	jumlah permohonan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan dibagi jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang direncanakan x 100%	80%	80%	80%	80%	
	Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mengikuti bimtek/diklat terkait pembinaan tenaga perancang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	
	Presentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	jumlah permohonan harmonisasi/jumlah harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan permohonan yang diselesaikan dibagi jumlah permohonan yang masuk x 100%	80%	80%	80%	80%	
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	jumlah permohonan rancanganperda yang difasilitasi oleh Kanwil yang diselesaikan dibagi jumlah permohonan yang masuk x 100%	80%	80%	80%	80%	
Terseleenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mengikuti bimtek/diklat terkait pembinaan tenaga	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas peraturan perundang-undangan	Survey Indeks kualitas peraturan perundang-undangan	3.1	3.15	3.2	3.25	
Terseleenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	jumlah hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan yang diselesaikan dibagi jumlah permohonan yang masuk x 100%	20%	20%	20%	20%	
	Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan dibagi jumlah RUU Parakarsa Pemerintah yang ada x 100%	25%	20%	15%	15%	
Terseleenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah yang dilakukan oleh Kanwil	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, DAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM							
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	70%	70%	70%	70%	
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Survey Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	77%	81%	81%	81%	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada x 100%	79%	80%	80%	80%	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Jumlah website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN dibagi Jumlah website anggota JDIHN x 100%	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	
Terwujudnya kesadaran dan Pemahaman hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Survey Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.6%	76.6%	76.6%	76.6%	
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	77%	81%	81%	81%	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	79%	80%	80%	80%	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survey Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61%	76.61%	76.61%	76.61%	
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	77%	81%	81%	81%	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibagi permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterima x 100%	79%	80%	80%	80%	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survey Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	77%	77%	77%	77%	
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Jumlah desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada x 100%	70%	70%	70%	70%	
	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	Jumlah website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN dibagi Jumlah website anggota JDIHN x 100%	20%	20%	20%	20%	
KEPALA BIDANG HAK ASASI MANUSIA							
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	Jumlah capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat yang memenuhi target dibagi jumlah capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat x 100%	65%	70%	75%	80%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	Jumlah capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/kota yang memenuhi HAM dibagi jumlah capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/kota x 100%	35%	40%	45%	50%	
Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM yang menerima penghargaan dibagi Jumlah Kab/Kota Peduli HAM x 100%	15%	20%	25%	30%	
	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dibagi Jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM yang diterima x 100%	50%	50%	50%	50%	
	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM dibagi Jumlah instansi pemerintah x 100%	75%	75%	75%	75%	
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM di wilayah	4 Ins Pem	4 Ins Pem	4 Ins Pem	4 Ins Pem	
	jumlah kab/kota peduli HAM	jumlah kab/kota peduli HAM di wilayah	3	3	3	3	
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM di wilayah	1	1	1	1	
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Jumlah rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3	3	3	3	
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	Jumlah KTI yang disitasi dibagi Jumlah KTI x 100%	20%	20%	20%	20%	
Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset.	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	70%	80%	80%	80%	
	Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal.	Jumlah sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal dibagi sitasi KTI dikali seratus persen	20%	20%	20%	20%	
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	70%	80%	80%	80%	
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	Jumlah penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	
KEPALA SUBBIDANG PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA							
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	Jumlah capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat yang memenuhi target dibagi jumlah capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat x 100%	65%	70%	75%	80%	
	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	Jumlah capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/kota yang memenuhi HAM dibagi jumlah capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah	35%	40%	45%	50%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM yang menerima penghargaan dibagi Jumlah Kab/Kota Peduli HAM x 100%	15%	20%	25%	30%	
	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dibagi Jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM yang diterima x	50%	50%	50%	50%	
	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM dibagi Jumlah instansi pemerintah x 100%	75%	75%	75%	75%	
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM di wilayah	4 Ins Pem	4 Ins Pem	4 Ins Pem	4 Ins Pem	
	jumlah kab/kota peduli HAM	jumlah kab/kota peduli HAM di wilayah	3	3	3	3	
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM di wilayah	1	1	1	1	
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Jumlah rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3	3	3	3	
KEPALA SUBBIDANG PENGAJIAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA							
Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset.	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	70%	80%	80%	80%	
	Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal.	Jumlah sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal dibagi sitasi KTI dikali seratus persen	20%	20%	20%	20%	
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	70%	80%	80%	80%	
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	Jumlah penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	Jumlah KTI yang disitasi dibagi Jumlah KTI x 100%	20%	20%	20%	20%	



Kepala Kantor Wilayah

Indro Purwoko
NIP 196202021985021001

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah
 Nomor : W14.3419.PR.01.03 TAHUN 2020
 Tanggal : 19 Juni 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN
 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TAHUN 2021-2024**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	Penilaian oleh Menpan RB	82	85	87	90	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian oleh Menpan RB	88	90	92	94	
	Nilai Maturitas SPIP	Penilaian oleh Tim Penilai ITJEN	3	3	3	4	
	Opini Atas Laporan Keuangan	Penilaian oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Indeks Persepsi Integritas	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Persepsi Integritas Kemenkumham oleh ITJEN	66	67	68	69	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	Jumlah satuan kerja yang mendapat nilai AKIP minimal "BB" dibagi seluruh satuan kerja dikali 100%	92%	93%	94%	95%	
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	Jumlah satuan kerja yang mendapat capaian nilai RB minimal 90 dibagi seluruh satuan kerja dikali 100%	92%	93%	94%	95%	
	Persentase Satuan Kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM	Seluruh satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibagi seluruh satuan kerja dikali 100%	6%	6%	6,5%	6,5%	
	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Persepsi Integritas Kemenkumham oleh ITJEN	66	67	68	68	



Kepala Kantor Wilayah

Indro Purwoko
 NIP 196202021985021001